



Perhitungan Jadup Capai Rp675 Ribu

● Sasar 19.200 KK Warga Miskin Selama Tanggap Darurat

YOGYA, TRIBUN - Keputusan pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat Pemda DIY melakukan kajian terkait tindak lanjut. Pemda meminta Biro Hukum dan BPBD DIY melakukan kajian tersebut.

"Saat ini yang kita pakai tanggap darurat. Kalau dengan tanggap darurat tidak ada masalah, ya sudah kita pakai itu saja. Kan sebenarnya Jakarta (pemerintah pusat) menunggu setiap daerah memiliki status. Tanggap darurat kita yang pertama (di Indonesia), disusul dengan DKI. Kalau dilihat dari UU Kebencanaan, sebenarnya cukup dengan tanggap darurat. Nanti kalau sudah selesai, kita ganti dengan rehab rekon," tutur Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, kemarin.

Kondisi di DIY, lanjutnya, sudah dibicarakan dengan legislatif. Eksekutif dan legislatif dijelaskan Aji sepakat untuk melihat dulu skema yang akan dilakukan oleh pemerin-

tah pusat. Ketika nantinya seluruh daftar masyarakat yang akan diberikan jaminan hidup (Jadup) tercukupi dari kucuran dana pusat, maka APBD DIY akan digunakan untuk keperluan penunjang kesejahteraan masyarakat.

"Lalu yang mestinya dapat jadup, tapi ternyata belum dapat, ya harus kita cover. Kita lihat kriteria pemerintah pusat seperti apa, lalu di DIY dilihat. Kalau untuk melengkapi apa yang disiapkan pemerintah pusat, saya rasa cukup," tuturnya.

Aji menambahkan, ia telah menjelaskan rancangan anggaran dihadapan DPRD DIY. Anggaran tersebut yang akan digunakan selama masa tanggap darurat bencana ini. Dana tersebut sebesar Rp26,9 miliar yang berasal dari dana tak terduga sebesar Rp 14,8 miliar dan sisanya beras dari realokasi APBD DIY.

● ke halaman 15

Perhitungan Jadup Capai Rp675

• Sambungan Hal 9

"Prinsipnya dewan tidak keberatan. Anggaran tidak bisa kita batasi keseluruhan. Misal kita sudah hitung desinfektan untuk dua bulan, tapi penyediaan alat di rumah sakit kan dipakai terus. Pencairannya kita buat bertahap. Tahap pertama Rp 9 miliar sekian, nanti bertahap. Prinsipnya yang belanja langsung dan belum kontrak dengan pihak ketiga, dimanfaatkan saja. Dewan tidak masalah," tuturnya.

Aji juga mengungkapkan bahwa perhitungan Jadup yang akan diterimakan kepada masyarakat DIY Rp675 ribu per KK yang menasar 19.200 KK warga miskin. Bantuan tersebut akan diberikan selama dua bulan masa tanggap darurat ini yakni April dan Mei. Perhitungan tersebut sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Hitung-hitungannya kita Rp675 ribu per bulan per KK. Kalau Jakarta ngasihnya Rp1juta, Alhamdulillah. Tapi kalau diberi Rp500 ribu, perlu kita pikirkan selisihnya," ucapnya.

Disinggung mengenai

bantuan akan diberikan dalam bentuk uang atau sembako, ia juga mengatakan bahwa ini juga masuk dalam pertimbangan.

"Diberikan dalam bentuk uang juga ada baiknya karena ekonomi berjalan. Orang beli makan di warung, warung dapet. Warung belanja beras dan sayur ke petani. Ekonomi jalan. Tapi dengan situasi seperti ini apakah memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan kita buka dapur umum," bebarnya.

Rantai Sosial

Dinas Sosial Kota Yogyakarta membuat rantai jaring sosial. Rantai jaring sosial tersebut meliputi pendataan, peluncuran bantuan sosial, hingga evaluasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengatakan saat ini masyarakat membuat semacam posko. Dengan adanya posko-posko di masyarakat tersebut, Dinsos Kota Yogyakarta merasa terbantu.

"Adanya posko-posko di masyarakat kami senang sekali. Kita bisa optimalkan posko-posko yang ada di masyarakat untuk penyaluran bantuan. Ini saatnya saling membantu dan gotong-royong," katanya, Kamis (2/4).

Ia melanjutkan, saat ini memang Dinsos Kota me-

iliki beberapa program bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini ada sekitar 14.300an KK atau 36.000 jiwa yang mendapat bantuan PKH di Kota Yogyakarta.

Dengan adanya Covid-19, Kota Yogyakarta bakal menambah nominal dan penerima PKH. Namun demikian, saat ini pihaknya masih menjadi pembahasan di tingkat provinsi.

"Nanti kita ikuti dari provinsi. Informasinya akan ditambah nominal dan jumlah penerimanya. Kalau misal nanti ditambah, kami siap saja," lanjutnya.

Bantuan dari pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, Pemkot Yogyakarta memberikan prioritas untuk warga yang terdaftar dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dari jaringan ini kita coba ringankan beban masyarakat. Memang kita prioritaskan masyarakat yang tidak mampu. Yang menjadi basis data sementara kami adalah KSJPS dan DTKS," tambahnya. (kur/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005